

**MUSYAWARAH PEMBANGUNAN NAGARI (MPN) DAN
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI PEDESAAN SUMATRA BARAT**

**MUSYAWARAH PEMBANGUNAN NAGARI (MPN)
AND THE DEMOCRATIZATION PROCESS IN
RURAL AREA OF WEST SUMATRA**

Ranny Ernita, Wisnu Purwati, Sri Zulhaningah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan, pelaksanaan dan nilai-nilai dalam MPN dan hubungannya dengan proses demokratisasi di Pedesaan Sumatera Barat. Fokus, serta pola-pola hubungan yang spesifik antara para aktor yang mengisi MPN dan kapasitas mereka dalam menunjukkan ukuran-ukuran demokrasi.

Dalam studi ini, pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan survei sampel, yang melibatkan sejumlah wawancara dan proses-proses dialogis antara peneliti dan para informan (partisipan peneliti).

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan pokok dalam pelaksanaan MPN: (1) Tidak terintegrasinya program MPN dalam program-program yang disediakan oleh pemerintah pusat, (2) yang menunjukkan perbedaan prioritas antara pemerintah dan masyarakat desa, (3) dan konflik antara birokrasi dan elite desa dalam menyuarakan program-program yang diputuskan oleh MPN. Kenyataan bahwa para aktor yang mengisi MPN tidak mampu menampung dan mengembangkan tuntutan-tuntutan kelompok potensial, para perantara yang terdidik dan profesional, menyediakan kompleksitas masalah dalam MPN; lembaga ini menampilkan dirinya sebagai subordinat dari birokrasi yang disusun secara sentralistik.

Penelitian ini dilakukan di nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar.

JURUSAN SOSIOLOGI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS
ANDALAS, NO. KONTRAK 022/P2/PP1/PPM/LETMUD/W/1997

**MUSYAWARAH PEMBANGUNAN NAGARI (MPN) DAN
PEMBANGUNAN DEMOKRASI DIPEDESAAN SUMATRA BARAT**

MUSYAWARAH PEMBANGUNAN NAGARI (MPN)
AND THE DEMOCRATIZATION PROCESS IN
RURAL AREA OF WEST SUMATRA
Renny Emilia, Wahyu Pratiwi, Sri Sulchairyah

ABSTRACT

This research investigates equipment, implementation and values of MPN and the relation to democratization process in rural area of West Sumatra, as well as specific patterns of relationship between the actors and their capacity to pursue democracy in society. Information are collected through observation and survey on samples, which involved interviews and dialogical process between the researcher and informants (participants of the research).

The finding shows several constrains of the implementation of MPN: (1) the programs are not fully integrated in the development programs provided by the central/regional government, (2) that indicated difference priorities between rural society and central political elite, (3) and conflicts between rural government and rural elite hold traditional authority in the society. The fact that the actors of MPN are not capable of accomodating new demands of the potential group, the *rantau* educated people and professionals provides a complexity in the problem. MPN reveal itself as a subordinate of the centralism/bureaucracy to a large extent.

This research is conducted in Nagari Padang Galing, Kecamatan Padang Galing, Kabupaten Batu Sangkar, West Sumatra.

DEPARTMENT OF SOSIOLOGI, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE,
ANDAAS UNIVERSITY, RESEARCH CONTRACT NO. 02/SP21/P30PPM/LETMUD/04/1997

PENDAHULUAN

MPN dimaksudkan sebagai wadah untuk memajukan rencana pembangunan pedesaan di Sumatra Barat sesuai dengan aspirasi penduduknya serta sebagai wadah untuk mengevaluasi perkembangan *nagari* (unit teritorial pedesaan menurut sistem pemerintahan tradisional Minangkabau). Anggota MPN adalah seluruh unsur kepemimpinan di nagari, seluruh aparat pemerintah desa, anggota KAN dan semua unsur masyarakat, alam uluau serta masyarakat nagari bersangkutan. MPN harus diadakan setiap tahun dan dilaksanakannya berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat nagari. Dalam MPN ini KAN diberi peran yang lebih penting sebagai pelaksana bersama aparat pemerintah desa dan umum (Mestika Zed, 1995: 340-341).

Studi ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang membangun MPN dan hubungannya dengan pembangunan demokrasi. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah MPN dapat menjadi perlengkapan desa untuk memajukan budaya partisipatif, atau itu hanya merupakan alat bagi memudahkan proses administratif dan tujuan-tujuan yang dibuat oleh pemerintah regional? Pada saat meneliti masalah ini, tujuannya tidak hanya untuk mengetahui mekanisme penentuan perencanaan pembangunan dalam MPN, tapi juga sistem nilai yang dipakai oleh para aktornya. Sasarannya ialah untuk mengetahui bagaimana MPN dipakai oleh mereka sebagai suatu lembaga demokratis. Pemeriksaan atas sistem nilai yang dipegang oleh para aktornya dan metode-metode yang dipakai dalam memajukan fungsi MPN tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan lembaga tersebut dalam memajukan ukuran-ukuran tentang demokrasi.

Melalui pemahaman bahwa kehendak terbanyak dari masyarakat setempat yang harus dipenuhi, maka tujuan lain dari penelitian ini adalah mencari pola-pola spesifik dari respon, tuntutan dan dukungan masyarakat terhadap MPN.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yang saling mengisi satu sama lain, yang melibatkan observasi langsung dan survei terhadap sample penelitian. Pendekatan pertama memungkinkan untuk membuat suatu deskripsi yang panjang tentang isu-isu yang pokok yang muncul dalam MPN, dan yang akan diamati dalam pelaksanaan praktisnya. Melalui ini peneliti membuat kategori spesifik dan mengungkapkan variabel-variabel independent dan dependent yang fundamental untuk dianalisa.

Deskripsi tentang faktor-faktor yang membangun MPN juga melibatkan hubungan-hubungan langsung dalam bentuk dialog dan wawancara antara peneliti dan para aktor yang menduduki posisi tertentu dan memainkan peranan penting dalam MPN. Dengan cara itu menjadi mungkin dipelajari beberapa hal yang menjadi faktor krusial dalam MPN. Penekanan dalam penelitian ini adalah pada praktek-praktek aktual dan hubungan-hubungannya dengan nilai-nilai budaya yang mentradisi dalam masyarakat Minangkabau serta pada kerangka kerja yang dipakai oleh para aktor yang secara timbal balik mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat atas MPN dan fungsi-fungsinya dalam MPN.

Melalui pendekatan yang kedua, survei terhadap sample penelitian, dibuat basis yang pokok untuk mengkuantifikasikan aspek-aspek tertentu yang sedang diamati. Aspek-aspek yang diamati tersebut adalah : (a). Kategori sosial aktor yang mengisi MPN, (b). Tuntutan dan dukungan masyarakat nagari terhadap MPN, dan (c). Partisipasi masyarakat dalam MPN.

Penelitian ini tidak dimulai dari satu set hipotesis tertentu, hipotesis muncul dari hasil observasi. Ini artinya peneliti mencari keteraturan atau pola-pola tertentu yang mengarahkan kehidupan lembaga yang diteliti, dan para aktornya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlengkapan dalam MPN Padang gasing

Nagari Padang gasing adalah tempat dimana MPN pertama kali diresmikan oleh Gubernur Sumatra Barat dalam tahun 1991. Anggota-anggota KAN, bersama aparat desa, merupakan kelompok utama yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan MPN. Pemilihan anggota KAN yang terlibat berdasarkan pertimbangan tradisi adat Minangkabau. Dalam konsep ini, anggota KAN adalah pe ngulu dari masing-masing salah dari berbagai tingkatan, pemimpin agama, cerdik pandai (intelektual) dan Bundo Kanduang.

Dari hasil survei terhadap semua Kepala Desa nagari Padang Gasing (empat orang) dan delapan (8) orang penduduk yang termasuk anggota KAN, kesemuanya dinilai sebagai penanggungjawab utama penyelenggara MPN, anggota-anggota MPN rata-rata terdiri dari kelompok berpendidikan menengah. Pekerjaan mereka kebanyakan petani dan penaninan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Pendidikan Dan Pekerjaan Kepala Desa

No.	Nama Desa Yang Dipimpin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Koto Gadang	SLTP	Pensuaman
2	Koto Alam	SLTP	Petani
3	Rajo Dani	SLTA	Petani
4	Koto Gadang Hilir	SLTA	Dagang

Tabel 2. Pendidikan Dan Pekerjaan Anggota KAN

No.	Nama desa yang diwakili	Pendidikan	Pekerjaan
1	Koto Gadang	Sitarama Altaba	Penjual
2	Koto Gadang	Tuchis -ti	Perdagangan
3	Koto Alam	MAN	Perdagangan
4	Koto Alam	MAN	Petani
5	Rajo Dani	SLTA	Peternak
6	Rajo Dani	Surgana Altaba	Pengrajin
7	Koto Gadang Hilir	SLTP	Petani
8	Koto Gadang Hilir	MAN	Pedagang

Dipandang dari segi usia gambaran pemimpin MPN juga tidak memencarakannya. Variasi usia tentu saja terdapat didalamnya, namun dengan mengutamakan kesederhanaan di tingkat pemerintah desa dan KAN, cukup banyak penyelenggara MPN yang berasal dari golongan usia muda terdapat dalam tabel.3

Tabel 3. Usia Penyelenggara MPN

No.	Rentang Usia	Jumlah
1	71 - 74	3
2	58 - 65	3
3	51 - 53	3
4	31 - 46	3
Jumlah		12

Dari data-data diatas timbul pertanyaan mengenai pola dan sistem rekrutasi dalam MPN. Mengapa bukan mereka yang memiliki pendidikan tinggi, dan juga profesional atau yang sudah yang menjadi pelaksana utama MPN. Ternyata pola dan sistem rekrutasi yang ada di tingkat desa

bisa dipakai oleh masyarakat itu. Siapa yang berhak menjadi anggota KAN masih sesuai dengan sistem adat yang berlaku. Padahal kepemimpinan adat tidak begitu mematuhi kepemimpinan birokrasi. Juga perlu dipertanyakan apakah anggota KAN bisa bekerja secara objektif dan efektif jika kewenangan yang diterimanya merupakan sesuatu yang "given" dan bukan berdasarkan prestasi. Terlebih lagi budaya paternalistik, birokratis dan feodal, telah tumbuh baik dalam lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat. Bila dilihat dari sudut pandang pelaksanaan adat, pemimpin adat, prosedur-prosedur demokrasi telah adat bisa diwujudkan kepada mereka.

Masalah lain yang dapat dipelajari dari situasi diatas adalah masalah kelendrasaan. Penanggungjawab utama pelaksana MPN bukan merupakan kualitas intelektual yang lebih besar dari penduduknya. Persoalan yang dihadapi mereka bukan hanya ketidakseragaman politik antara aparat desa dan anggota KAN, tetapi juga permasalahan informasi yang diperlukan untuk membuat suatu pilihan. Aparat desa, tidak perlu menanggung beban tersebut karena mereka cukup memberikan penjelasan berdasarkan instruksi dari atas dan pertimbangan-pertimbangan nasional. Tapi sebaliknya, anggota KAN berhadapan dengan kepulauan kelompok suku/kampungnya. Sehingga dengan demikian mereka harus terus mengadani pertimbangan dan menajutkan kepentingan kerabatnya. Sedangkan hubungannya dengan anggota kerabatnya yang memiliki penguasaan informasi, pengalaman kepemimpinan, atau pengetahuan lebih baik, hanya sebatas pada posisi dan peranan adat yang dimilikinya. Dari posisi adat, pemimpin adat harus dipotensi, tapi dari posisi realistik dan pragmatik mereka justru tidak lebih memukau dari anggota adat atau kampungnya. Tapi pendelegasian wewenang menjadi tidak mungkin, karena melingkar ketentuan adat.

B. Pelaksanaan MPN di Padang Garing

Sejak pertama kali dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan dana tiga kali MPN terlaksana. Ini artinya, harapan bahwa Mubandag akan terlaksana sedemikian luwesnya satu kali dalam setahun tidak terwujud. Pelaksanaan Musibandag yang kedua yakni pada tahun 1993 dan yang ketiga pada tahun 1995. Menurut Wakil KAN untuk Padalarang Garut (Dr. Puadito Laha) tahun 1997 akan dilaksanakan MPN yang keempat, namun sampai laporan ini dibuat belum diperoleh informasi kapan tepatnya dan bagaimana pelaksanaannya. Kendala pertama yang dijumpai dalam pelaksanaan MPN, sehingga target utama pelaksanaan satu kali setahun tidak tercapai, adalah sulitnya mengkoordinasikan orang-orang yang menyebar di berbagai daerah. Masalah seperti tempat tinggal yang berjauhan membuat penyelenggara sulit untuk menampungkan mereka.

Masalah lain yang ditemukan dalam pelaksanaan MPN adalah rendahnya komitmen anggota KAN untuk terlibat dalam MPN. Yang terakhir ini berkaitan dengan lemahnya posisi KAN dihadapan pemerintah desa. Tampak jelas banyak anggota KAN yang lebih banyak semangat untuk memajukan penyelenggaraan MPN. Alasan yang dikemukakan antara lain karena tidak banyak peluang untuk menyalurkan program-program sesuai dengan prioritas-prioritas yang mereka usulkan. Alasan lain ialah adanya benturan-benturan antara keputusan MPN dan kebijakan pemerintah desa. Setiap keputusan yang diambil menghardaki dukungan penuh dari pemerintah desa, baik itu menyangkut dana maupun dukungan politik. Dukungan inilah yang sering tidak dapat diberikan oleh pemerintah desa.

Disisi lain, di pihak pemerintahan desa, mengesamping masalah dalam kemampuan mental dan nasihat anggota KAN. Sejak pemerintah desa semakin cenderung yang cenderung, cenderung untuk membuat keputusan sendiri dalam pengelolaan desa, masalahnya diturunkan dari kewenangan yang lebih tinggi, pemerintah Kecamatan, maka prioritas-prioritas yang diberikan pada program-program

yang ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan atau yang lebih tinggi. Dalam beberapa perundang-undangan daerah Pemerintah Desa yang seharusnya melaksanakan keputusan MPN. Tapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa sering tidak melaksanakan program MPN. Alasannya karena pemerintah desa telah mempunyai rencana anggaran pembangunan desa (RAPD) sendiri yang digariskan oleh pemerintah kabupaten. Seringkali apa yang ditetapkan dalam RAPD tidak mencakup program-program yang dirumuskan dalam MPN atau tidak sesuai dengan rencana MPN. Akibatnya, sebagian besar keputusan yang dilantik dalam MPN tidak dapat diwujudkan kedalam bentuk aksi-aksi yang kongkrit dan tinggal menjadi rencana pembangunan desa diatas kertas.

Dari sekian banyak program yang ditetapkan MPN hanya tiga macam program yang dilaksanakan, itupun karena program-program tersebut memang merupakan rencana program yang telah ditetapkan dari atas. Program tersebut adalah: pembangunan jalan desa, irigasi, dan pembangunan sarana-sarana ibadah.

Penerapan sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi sebab penting tidak berjalannya MPN sesuai dengan gagasan asalnya. Kendala struktural membuat pemerintah desa tidak memiliki keluasaan untuk merdayakan MPN sebagai badan perencanaan pembangunan. Sebaliknya ELAN juga tidak memiliki sumberdaya politik yang cukup untuk memperkuat kedudukan MPN. Dalam kondisi yang semacam ini maka kecil kemungkinannya MPN mampu bertindak sebagai lembaga pengambil inisiatif atau lembaga perencanaan pembangunan desa.

C. Hubungan Para Aktor Dalam MPN

Anggota KAN dalam MPN bertindak sebagai perwakilan rakyat ungari. Namun perlu juga diingat bahwa masing-masing bertindak sebagai wakil dari kampung atau selannya. Dalam kedudukan yang semacam ini setiap anggota KAN memiliki kecenderungan untuk memberikan

prioritas pada program yang menguntungkan kerubut atau kampungnya. Sebaliknya, aparat desa orientasi kepentingannya adalah menjaga kewenangan formal yang dimilikinya. Untuk itu mereka harus mengikuti instruksi pemerintah di atasnya. Dengan adanya visi yang berbeda-beda tentang kebutuhan (needs) dan tentang prioritas (priorities), maka konflik sering terjadi. Seperti yang dialami oleh seorang anggota KAN, pelaksanaan MPN seringkali hanya menjadi arena untuk mengkritik pemerintah desa atau saling kritik antara sesama anggota KAN.

Ada pendapat bahwa MPN memiliki keterkaitan dengan aturan yang telah dibuat secara formal. Jika memutuskan sesuatu tidak boleh bertentangan dengan rencana-rencana pembangunan pemerintah. Jadi pertimbangan-pertimbangan dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan rencana pembangunan pemerintah adalah wilayah pembangunan yang mungkin diusulkan oleh MPN. Hal semacam ini telah membatasi ruang lingkup pembangunan yang bisa diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu, sama dengan lembaga-lembaga desa lain, MPN tidak lebih sebagai perpanjangan birokrasi pemerintah untuk melaksanakan suatu yang rutin dan mensukseskan tujuan-tujuan pemerintah.

Seharusnya MPN dapat saja melakukan perubahan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Beberapa usul perubahan pernah diajukan oleh beberapa tokoh intelektual. Misalnya, mereka mengusulkan agar susunan nagari Padang Ganting dibetulkan kembali kepada asalnya. Namun hal itu tidak dapat dipenuhi karena tidak termasuk kepada prioritas pembangunan pemerintah. Dipihak lain, banyak anggota KAN yang menganggap program mereka sudah terwakilkan dalam program-program pembangunan desa yang ditetapkan dalam MPN. Masalah yang muncul justru timbul dalam menentukan prioritas pelaksanaan. Masing-masing aktor mengabdikan program yang akan dibuat dikampungnya yang harus diprioritaskan dulu.

Kelompok orang yang berpendidikan dan pekerja profesional, merupakan kekuatan sosial

yang terpenting di nagari Padang Ganting. Disamping pendidikannya, kedudukan mereka dalam jabatan-jabatan publik dan militer dapat dipertimbangkan sebagai faktor kelangkaan yang bisa digernak dalam rangka menembus kelangkaan birokrasi. Jadi secara kategori sosial mereka inilah kelangkaan sosial yang penting dalam memajukan prosedur-prosedur demokrasi di MPN Padang Ganting. Meskipun secara administratif tempat kediaman mereka berada di luar nagari.

Dalam kenyataannya bagaimana merealisasikan partisipasi mereka dalam menciptakan dinamika politik bukan persoalan yang sederhana. Konflik kepentingan antara kelompok sosial ini dan pemerintahan desa/kecamatan merupakan contoh yang menarik bagaimana partisipasi politik dapat secara efektif berubah menjadi apati oleh kendala-kendala birokrasi. Kelompok ini sering mengajukan program-program yang perlu dipertimbangkan oleh MPN, melalui pertemuan atau musyawarah perantaraan. Musyawarah ini dilakukan setahun sekali, biasanya dalam waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Rapat ini merupakan peristiwa besar di nagari Padang Ganting, dan dilaksanakan di luar MPN. Dalam rapat inilah sebagailah program-program yang berguna bagi pembangunan nagari dihasilkan. Namun MPN tidak mampu untuk menampung gagasan-gagasan mereka, karena keterbatasannya baik dalam hal sumberdaya politik maupun kemampuan dalam mengembangkan usulan-usulan tersebut menjadi suatu keputusan MPN.

Dalam ketentuannya MPN juga harus melibatkan suatu-satu nagari dalam membuat berbagai keputusan. Diperkirakan telah banyak penduduk Padang Ganting yang menikmati pendidikan sekurang-kurangnya tingkat sekolah menengah. Perencanaan penduduknya pun tidak dapat dikatakan terbelakang. Selain ditopang oleh tanah yang subur, posisi geografis yang strategis yakni sebagai lintasan dua pusat kegiatan ekonomi, kota Batubangkak dan Sawahlunto, teknologi baru juga hadir disini. Penduduknya bahkan senantiasa memperoleh berbagai informasi yang

datang nilai berganti dari para politikus, dan masalah elektoral, dan juga peran berbagai organisasi baik yang dipkerjakan oleh pemerintah maupun universitas-universitas. Pengetahuan tentang gaya hidup modern telah merayap dan mempengaruhi kehidupan penduduknya.

Jika transformasi demokrasi dilihat sebagai fungsi aktualisasi dan modernisasi, maka akan muncul suara-suara keras dari anak-anak nagari Padang Ganting memantol hak-hak demokratisnya. Dari hasil survei terhadap 20 penduduk dewasa yang mewakili semua desa di nagari Padang Ganting diketahui sebagian kecil saja (10%) penduduk yang pernah menggunakan hak-hak demokratisnya terhadap MPN, meskipun lebih separuh (60%) penduduk menyadari kehadiran MPN. Untuk program MPN hampir seluruhnya memuaskan sudah mewakili kebutuhan mereka. Yang umumnya mereka tuntut hanyalah informasi tentang apa-apa yang dibuat dan diputuskan oleh MPN. Namun ketika informasi itu tidak diperoleh tidak muncul dorongan untuk memintanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Catatan Akhir

Nagari Padang Ganting merupakan contoh yang baik untuk mengupayakan kemandirian budaya di Minangkabau. Karena selama ini komunitas adat tersebut dianggap sebagai tempat yang melahirkan individu-individu yang demokratis. Berbeda dengan masyarakat tersebut, sistem paternalistik, feodal dan hierarkis sudah menjadi sebuah tradisi. Masyarakat ini tidak mengenal perubahan dalam hal kepemimpinan. Tanpa adanya pengalaman terlibat dalam proses politik yang demokratis, sulit mengharapkan lembaga-lembaganya dapat berkembang ke arah ini.

KAN yang memegang tanggungjawab untuk memasyarakatkan ukuran-ukuran demokrasi justru yang memperoleh hak-hak istimewa untuk berurusan dalam masyarakat itu. Sebaliknya aparat desa umumnya sudah terjebak dalam kelangkaan birokrasi yang otoriter, dan meyakini bahwa dirinya adalah personifikasi dari stabilitas politik dan sistem negara. Ini dapat memperjelas mengapa MPN tidak dapat diharapkan untuk menjadi instrumen yang demokratis, dan memasyarakatkan ukuran-ukuran demokratis dalam masyarakat masyarakat.

Pada saat ini lembaga-lembaga dengan model ini tampaknya tidak bisa dipukul untuk memperkuat masyarakat desa. Karena masalah prosedur-prosedur demokratis dikembangkan didalamnya. Sebagai gantinya lembaga desa harus dibentuk di atas landasan keadilan-keadilan sosial yang betul-betul bisa membawa dan memperjuangkan kepentingan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alliri, 'Kepemimpinan Dan Struktur Kelenteng Lokal Dalam Pembangunan (Penelitian di Tiga Desa di Sumatera Barat)'. *Forum*, Vol. 2, No. 4, Pusat Studi Pembangunan Dan Perubahan Sosial, Padang (PSPS) Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Apter, D., *The Politics of Modernization*, Chicago, University of Chicago Press, 1963.
- Asfar, Muhammad, 'Beberapa Kendala Implementasi Program Bina Desa (Meningkatkan Pembangunan Desa)'. *Makalah untuk Seminar Nasional XIV "Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Desa"*, Jember, Tanggal 8-9 Juli 1996.
- Craig, Gary, dan Marjorie Mayo (eds), *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*, London, New Jersey: Zed Books, 1995.
- Huntington, S.P. *Political Order in Changing Societies*, New Haven, Yale University, 1968.
- Huntington, S.P., and Nelson, J., *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Cambridge, Harvard University Press, 1976.
- Lerner, D., 'Communication Systems and Social Systems: A Statistical Exploration in History and Policy', *Behavioral Science*, 2, 1957.
- Lipset, S. M., *Political Man: The Social Roots of the Party*, London, Heinemann, 1956.
- Musad, Dharudin, 'Pembangunan Dan politik Desa: Pemahaman Raj Desa Problem Kultural Dalam Masyarakat India'. *Makalah untuk Seminar Nasional XIV "Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Desa"*, Jember, Tanggal 8-9 Juli 1996.
- Mochtar Naim, "Nagari Versus Desa: Sebuah Komparasi Struktural", dalam *Nagari, Desa, dan Pembangunan Persepsi di Masyarakat Barat*, Padang, 1990.
- More Jr, B., *Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of Modern World*, Boston, Beacon Press, 1966.
- Palmer, L.H. *Indonesia and the Dutch*, London: Oxford University Press, 1992.
- Selosoemardjan, *The Dynamics of Community Development in Rural Central and West Java: A Comparative Report*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1963.

- Suicrisna, Lockman, 'Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan' *Abstraksi untuk*
Seminar Nasional XIV "Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Desa", Jember, 8-9 Juli
1996.
- Tjondronegoro, *Social Organization and Planned Development in Rural Java*,
Singapore: Oxford University Press, 1993.
- _____ 'Beberapa Segi Potensi Sosial Unsur Pedesaan', *Jurnal Penelitian*
Sosial, Vol 1, No. 1, 1976, hal 1-25.
- White, B. 'Population, Involution and Employment in Rural Java', *Local and Development and
Change*, The Hague, 1976.
- Zainuddin, A. Rahman, 'Desa Sebagai Sumber P. ekonomi', *Abstraksi untuk*
Seminar Nasional XIV "Pembangunan Politik Dan Pemerintahan Desa", Jember, tanggal
8-9 Juli 1996.
- Zed, Mestika, et.al, *Sumatara Barat Di Pergumulan 1945-1995*, Sumatera
Barat: Grafika Sumatera Barat, 1995.